

INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD) KOTA PAREPARE TAHUN 2008

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, Tanggal 4 Januari 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada DPRD, serta Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) kepada masyarakat, maka berikut ini diinformasikan mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun 2008, yang digunakan oleh Pemerintah sebagai dasar pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi bahan pembinaan lebih lanjut terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah.

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun 2008 adalah merupakan ringkasan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Ruang lingkup pembahasannya mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

A. GAMBARAN UMUM KOTA PAREPARE

Kota Parepare terletak pada jalur perlintasan transportasi darat maupun laut untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi Selatan, baik arah Utara - Selatan maupun arah Timur - Barat. Sesuai dengan arahan pengembangan wilayah, Kota Parepare ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Antar Wilayah (PPAW) untuk bagian tengah Propinsi Sulawesi

Selatan, dengan demikian fasilitas pelayanan antar wilayah banyak dikembangkan di kota ini.

Kota Parepare secara geografis berada pada 3°57'39" - 4°04'49" Lintang Selatan dan 119°36'24" - 119°43'40" Bujur Timur. Kondisi topografi wilayah mencakup ; *i*) dataran dan *ii*) perbukitan. Bentuk lahan dataran terletak di wilayah pesisir pantai merupakan daerah yang cukup padat sebagai pusat aktifitas kota. dikenal sebagai Kota Bawah, luas untuk wilayah ini sekitar 30 persen dari luas wilayah seluruhnya. Selanjutnya, bentuk lahan perbukitan merupakan wilayah yang dominan di Kota Parepare, memanjang dari arah Utara - Selatan dan Timur - Barat. Wilayah ini merupakan wilayah pengembangan yang sifatnya terbatas, dengan kondisi perbukitan yang mempunyai kelerengan curam. Luas wilayah untuk daerah perbukitan sekitar 70 persen dari luas wilayah Kota Parepare. Secara administratif wilayah Kota Parepare terbagi menjadi 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan.

Tahun 2008 penduduk Kota Parepare sebanyak 124.469 Jiwa, yang terdiri dari perempuan sebanyak 63.990 jiwa atau 51,41 persen dan laki-laki sebanyak 60.479 jiwa atau 48,59 persen, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 1.171 jiwa/Km². Sex ratio Kota Parepare pada Tahun 2007 sekitar 96,00 yang berarti terdapat sekitar 96 orang laki-laki diantara 100 perempuan. Komposisi penduduk menurut kelompok umur pada tahun 2008, menunjukkan bahwa 54.85 persen dari total jumlah penduduk Kota Parepare adalah kelompok muda, 9.85 persen balita, 20.07 persen kelompok anak-anak dan 10.88 persen adalah kelompok remaja. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan penduduk lebih difokuskan pada kelompok ini, dimana beban tanggungan ekonomi terhadap kelompok usia muda cukup tinggi yakni sebesar 45,54

persen, jika dibandingkan dengan kelompok tua sebesar 6,57 persen. Ini berarti bahwa dominasi beban tanggungan penduduk produktif di Kota Parepare ini masih didominasi oleh usia muda.

Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2008 sebanyak 37.252 jiwa, atau sebesar 32.02 persen dari total jumlah penduduk Kota Parepare. Komposisi penduduk yang bekerja berdasarkan jenis pekerjaan utamanya, sebagian besar bekerja sebagai tenaga penjualan sebesar 45.42 persen dari total penduduk yang bekerja, sebagai tenaga produksi 24,73 persen dan tenaga profesional 29.87 persen. Jika melihat dari status pekerjaan yang digeluti, maka penduduk yang bekerja sebagai buruh atau karyawan yakni sebesar 58.37 persen, kemudian mereka yang berusaha secara mandiri sebesar 33.27 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk yang bekerja masih menggantungkan pada pihak lain sebagai tempat bekerja jika dibandingkan dengan mereka yang mandiri yaitu bekerja tanpa ada bantuan atau campurtangan dari pihak lain.

Komposisi penduduk Kota Parepare menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan berdasarkan kategori tidak / belum tamat SD 19.82 persen (2007) menjadi 14.48 persen (2008), SD 23.40 persen (2007) menjadi 21.80 persen (2008), SLTP 20.48 persen (2007) menjadi 20.39 persen (2008), SLTA 28.25 persen (2007) menjadi 32.45 persen (2008), dan Universitas / Diploma IV 8.06 persen (2007) menjadi 9.53 persen (2008).

Kondisi ekonomi Kota Parepare menurut lapangan usaha yang berkembang, potensi unggulan daerah berdasarkan lapangan usaha dan struktur ekonomi yang dominan berkembang di Kota Parepare ditunjukkan oleh sektor; *i)* perdagangan, hotel dan restoran dengan rata-rata

kontribusi pertahun sebesar 6.35 persen, *ii*) angkutan dan komunikasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 6.61 persen, dan *iii*) jasa dengan rata-rata kontribusi sebesar 8.64 persen. Perkembangan PDRB harga berlaku pada Tahun 2008 adalah sebesar 17.96 persen atau sebesar Rp 1.063.435,38 (juta), sementara PDRB berdasarkan harga konstan Tahun 2008 adalah sebesar 6,98 persen atau sebesar Rp 609.224,94 (juta) dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,23 persen. Indikasi pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan kecenderungan terus meningkat, dengan kisaran trend pertumbuhan sebesar 0.99 persen begitu pula dengan perkembangan ekonominya. Rata-rata pertumbuhan riil PDRB Kota Parepare adalah sebesar 6.46 persen, dimana sektor keuangan dan perbankan menduduki peringkat pertama dari segi tingkat pertumbuhan sebesar 13.69 persen. Berikutnya adalah sektor bangunan dan konstruksi sebesar 8.27 persen, selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 7.23 persen, kemudian sektor angkutan dan komunikasi sebesar 5.64 persen, lalu kemudian sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 5.30 persen.

Pendapatan perkapita masyarakat Kota Parepare dalam tiga tahun terakhir dari Rp 6.895.533,- Tahun 2005, menjadi sebesar Rp 9.143.191,- pada tahun 2007. Perbandingan PDRB per kapita Kota Parepare dengan Propinsi Sulawesi Selatan, menunjukan bahwa sampai dengan tahun 2007 PDRB per kapita Kota Parepare diatas Propinsi Sulawesi Selatan.

Dalam rangka mengukur keberhasilan atau kinerja pembangunan manusia Kota Parepare, menggunakan parameter Indeks Pembangunan Manusia (*sumber data*: IPM Tahun 2008) atau Human Development Index (HDI) dengan tiga indikator yaitu :

1. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan dengan pilihan Angka Harapan Hidup yang mencerminkan pembangunan manusia bidang kesehatan. Pada Tahun 2007 angka harapan hidup Kota Parepare tercatat sekitar 72,90 Tahun, meningkat dibandingkan dengan Tahun 2005 yang besarnya sekitar 72,70 Tahun. Hal ini dapat diartikan bahwa kondisi kesehatan masyarakat Kota Parepare semakin baik dalam kurun waktu 2005-2007. Sementara itu indeks kesehatan Kota Parepare Tahun 2007 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks kesehatan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 yaitu sekitar 69,40 Tahun.

2. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan gabungan antara 2 (Dua) pilihan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Indeks Pendidikan di Kota Parepare selama periode 2005-2007 mengalami peningkatan dari 82,30% pada Tahun 2005 menjadi 84,10% pada Tahun 2007. Hal ini terjadi karena komponen pilihan Angka Melek Huruf juga mengalami kenaikan dari 93,50% pada Tahun 2005 menjadi 96,20% pada Tahun 2007. Sementara itu, rata-rata lama sekolah juga mengalami kenaikan dari 8,9 Tahun pada Tahun 2005 menjadi 9,3 Tahun pada Tahun 2007. Sebagai perbandingan, indeks pendidikan Kota Parepare Tahun 2007 sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan indeks pendidikan Sulawesi Selatan yaitu 84,10% pada tahun yang sama.

3. Indeks Paritas/Kemampuan Daya Beli

Komponen PPP (Purchasing Power Parity) dikenal sebagai komponen kemampuan daya beli atau standar hidup layak dalam

laporan ini menggunakan PDRB riil perkapita. Penggunaan PDRB riil perkapita ini karena data yang ideal (modul konsumsi Susenas) belum sampai estimasi Kabupaten/Kota. Namun dengan asumsi bahwa PDRB Kota Parepare dinikmati oleh sebagian besar penduduk, maka dianggap masih relevan dengan tingkat pendapatan sebagai indikator standar hidup layak. Daya beli penduduk Kota Parepare pada Tahun 2005 sekitar Rp 630.100,- meningkat pada Tahun 2007 menjadi sebesar Rp 634.120,-. Sementara itu, rata-rata daya beli penduduk Sulawesi Selatan pada Tahun 2007 adalah sebesar Rp 625.230,-. Selanjutnya indeks PPP Kota Parepare sekitar 62,4 pada Tahun 2005 dan pada Tahun 2007 mengalami peningkatan menjadi 63,3.

Penggunaan parameter Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memakai kriteria makin tinggi nilai IPM suatu daerah maka makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia Kota Parepare pada Tahun 2005 sekitar 74,7, kemudian mengalami peningkatan menjadi 76,01 pada Tahun 2007.

B. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Parepare Tahun 2008 merupakan Tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Parepare 2006-2008, dengan visi ***“Terwujudnya Parepare sebagai Kota Jasa, Niaga dan Pendidikan menuju Kota Bandar Madani.”***

Untuk mendukung terwujudnya cita-cita dan harapan segenap komponen masyarakat ke depan yang tertuang pada Visi Pemerintah Kota Parepare hingga tahun 2008 tersebut di atas, maka dirumuskan misi Pemerintah Kota yang diarahkan pada :

1. **Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan kota** sesuai dengan struktur dan fungsi pemanfaatan ruang (merujuk pada RTRW Kota Parepare), seperti : pengembangan kawasan industri manufaktur dan pergudangan di Kelurahan Lapadde, Watang Bacukiki, Watang Soreang, dan Cappa Ujung, serta Pusat perdagangan/ pembelian di kawasan Kota, pusat pelayanan transportasi di LumpuE;
2. **Pengembangan kawasan-kawasan pelabuhan**, yang secara perspektif diarahkan pada pengembangan fungsi pelabuhan sebagai inlet dan outlet yang melayani kota dan daerah lainnya (hal ini merujuk pada fungsi sebagai pusat pengembangan ekonomi terpadu/KAPET)
3. **Kehidupan masyarakat yang agamais**, yaitu seluruh aktivitas komponen masyarakat kota diarahkan dan berpedoman pada nilai-nilai agama, kerukunan hidup antar umat beragama, serta mendorong tumbuhnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.
4. **Berkelanjutan**, diarahkan pada terselenggaranya pembangunan ke depan secara berkesinambungan sebagaimana yang telah direncanakan dan dirancang pada waktu sebelumnya.
5. **Partisipatif**, mendorong setiap komponen masyarakat kota untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan tindakan bagi kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. **Demokratis**, diaktualisasikan ke dalam prinsip kebersamaan, kesetaraan, kebebasan dan keterbukaan sesuai prinsip-prinsip tatanan kehidupan bermasyarakat.
7. **Nilai-nilai budaya lokal**, diarahkan pada tata kehidupan bermasyarakat berlandaskan pada budaya-budaya lokal yang hidup dan telah mentradisi dalam pergaulan masyarakat.

8. **Nyaman dan indah dalam kondisi bersih, sehat, aman, bahagia dan sejahtera**, diarahkan pada kehidupan kota sebagai suatu pemukiman yang memenuhi syarat dan standar lingkungan fisik, kultur dan sosial.

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Parepare Tahun 2008 terdiri dari:

1. Mewujudkan supremasi hukum dan penyelenggaraan pemerintahan;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan infrastruktur investasi dengan tetap berlandaskan ekonomi kerakyatan;
3. Memperkuat landasan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan;
4. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum untuk menunjang pelayanan publik yang maksimal;
5. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, kualitas kehidupan beragama, ketahanan budaya dan penataan ketenagakerjaan.

Strategi dan arah kebijakan daerah tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, antara lain :

1. Pengembangan supremasi hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang arahan pengembangannya difokuskan pada pengembangan produk hukum yang transparan, partisipatif dan komunikatif serta penyelenggaraan sistem pemerintahan yang akuntabel dengan penerapan sistem pelayanan prima;
2. Pengembangan perekonomian, yang arahan pengembangannya difokuskan pada pemberdayaan ekonomi lokal dengan peningkatan infrastruktur perekonomian dan peningkatan SDM pelaku perekonomian;

3. Pengembangan sumber daya alam, lingkungan hidup dan kelautan, yang arahan pengembangannya difokuskan pada pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya alam dengan memperhatikan aspek keserasian dan keseimbangan lingkungan;
4. Peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum, yang arahan pengembangannya difokuskan pada peningkatan infrastruktur penunjang perekonomian, penataan ruang, pelayanan pertanahan serta perumahan dan pemukiman;
5. Pengembangan dan peningkatan kesejahteraan rakyat, yang arahan pengembangannya difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kepemudaan, kualitas aparatur pemerintah, kualitas keagamaan, sosial budaya dan politik.

Khusus yang terkait dengan strategi dan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 diarahkan pada:

1. Pada sisi pendapatan daerah, peningkatan pendapatan diarahkan pada optimalisasi penerimaan daerah dengan menghindari upaya penerimaan pajak dan retribusi daerah yang akan menambah beban masyarakat;
2. Pada sisi penggunaan belanja daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
3. Pada sisi penerimaan pembiayaan daerah, harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan guna mencukupi defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan, digunakan untuk memenuhi kewajiban angsuran hutang pokok serta penyertaan modal dalam rangka meningkatkan investasi modal pada Bank Sulsel.

C. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (DESENTRALISASI)

Untuk mengetahui penyelenggaraan urusan desentralisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Parepare pada tahun 2008, berikut ini adalah uraian capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan menurut **urusan wajib** dan **urusan pilihan** yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Parepare Tahun 2006 - 2008.

PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB

1. Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat berperan dalam mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas, sehingga sektor ini perlu mendapatkan prioritas pelaksanaan program dan kegiatan. Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk urusan ini adalah sebesar Rp 23.465.485.460,- (belanja langsung) dengan realisasi anggaran adalah Rp 22.979.849.704,- atau sebesar 97,93%. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut yaitu :

- a. Meningkatnya pemerataan pendidikan serta sarana dan prasarana pendukung pada semua jenjang pendidikan, diukur dengan menggunakan indikator ;
 - 1) *Program Wajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah*, melalui kegiatan peningkatan akses (peningkatan prasarana dan sarana pendidikan), terlihat adanya capaian daya tampung siswa yang meningkat. Pada Tahun Pelajaran 2008/2009

jumlah siswa SD/MI sebanyak 17.319 siswa, SMP/MTs sebanyak 7.416 siswa dan SMA/MA/SMK sebanyak 7.995 siswa. Peningkatan daya tampung tersebut tentunya diikuti dengan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK). Untuk APK tingkat SD mencapai 124.86%, tingkat SMP 110.25% dan tingkat SMA baru mencapai 99.06%. APK ini memberi gambaran perbandingan antara jumlah anak yang bersekolah dengan jumlah anak yang berusia sekolah, sesuai tingkatannya. Artinya, jika persentase mencapai nilai 100%, berarti jumlah anak yang bersekolah sama dengan anak usia sekolah sesuai tingkatannya. Apabila nilainya lebih dari 100%, berarti ada usia anak sekolah yang bersekolah dan berasal dari luar daerah Kota Parepare.

2) *Program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan*

Dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kuantitas dan kualitas ruang kelas melalui pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi. Kondisi keadaan RK (Ruang Kelas) pada tahun 2008 adalah sebagai berikut :

- (a) Untuk tingkat TK jumlah RK sebanyak 157 RK dengan kondisi Baik 92 RK, rusak ringan 34 RK dan rusak berat 9 RK. Untuk RK tingkat SD SD/MI dari dari 624 ruang kelas (RK), yang memiliki kondisi baik sebanyak 527 RK , rusak ringan 78 RK dan yang rusak berat 19 RK;
- (b) Pada tingkat SMP/Mts, dari 258 ruang kelas (RK), yang memilki kondisi baik 222 RK, rusak ringan sebanyak 25 dan rusak berat masih ada sebanyak 11 RK; dan

- (c) Sedangkan untuk tingkat SMA/MA/SMK, dari 251 ruang kelas (RK), yang memiliki kondisi baik sebanyak 200, rusak ringan sebanyak 38, dan rusak berat masih ada sebanyak 13 RK.
- b. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Aparatur, Kegiatannya dalam bentuk pemberian bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk meningkatkan kualifikasi ijazahnya serta bantuan pelayanan administrasi dalam bentuk surat izin belajar. Rekapitulasi jumlah guru menurut tingkatan dan ijazah yang dimiliki adalah sebagai berikut:
- 1) Untuk tingkat SD, dari 1.107 guru, maka jumlah guru menurut ijazah tertinggi adalah S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 458 orang, D3 sebanyak 35 orang, D2 sebanyak 426 orang, D1 sebanyak 12 orang dan yang setara SMA sebanyak 174 orang.
 - 2) Jumlah guru SMP menurut ijazah tertinggi adalah S2 sebanyak 9 orang, S1 sebanyak 440 orang, D3 sebanyak 76 orang, D2 sebanyak 45 orang, D1 sebanyak 19 orang dan setara SLTA sebanyak 19 orang.

Pada Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan, melalui kegiatan Pemilihan guru berprestasi, telah berhasil menjadi **Juara I (pertama) tingkat nasional** untuk kategori Kepala Taman Kanak - Kanak berprestasi.

Patut disyukuri karena keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sehingga beberapa indikator bidang pendidikan juga mengalami peningkatan dari Tahun 2007 ke Tahun 2008, antara lain:

- a. Penduduk usia 15 Tahun keatas yang melek huruf mengalami peningkatan dari 98,92% menjadi 99,69%;

- b. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI mengalami penurunan dari 0,13% menjadi 0,09%; SMP/MTs dari 0,55% menjadi 0,34%; dan SMA/SMK/MA dari 0,75% menjadi 1,67%;
- c. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dari 106,72% menjadi 98,83%, dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari 153,94% menjadi 221%; dan
- d. Guru yang memenuhi kualifikasi ijazah S1/D-IV dari 59,44% menjadi 66,79%.

2. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program penanganan bidang kesehatan yang berorientasi pada aspek pengelolaan manajemen kesehatan serta pelayanan kesehatan dasar dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk urusan ini adalah Rp 29.317.627.920,- (belanja langsung) dengan realisasi anggaran adalah Rp 29.166.851.077,- atau sebesar 99,49%. Indikator untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan diuraikan sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pelayanan teknis kesehatan dan medik dasar serta penyediaan obat dan perbekalan kesehatan

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan yang diperuntukkan bagi kegiatan pelayanan kesehatan pada unit kerja Puskesmas dan puskesmas pembantu se-Kota Parepare, sehingga diharapkan dengan tersedianya obat dan perbekalan tersebut akan menjamin

kelancaran pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Parepare.

- b. Pemantapan upaya kesehatan masyarakat serta sanitasi dasar dan kesehatan lingkungan sekaligus pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

Upaya pembinaan kesehatan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan serta penyebaran informasi melalui pengadaan brosur-brosur, pamflet-pamflet yang berisikan informasi dan tata cara perilaku hidup sehat menurut ilmu kesehatan serta prosedur penanggulangannya apabila mengalami situasi yang membutuhkan segera pertolongan pertama sebelum ditangani oleh tenaga medis dan paramedis. Untuk tindakan pencegahan terhadap penularan dan penyebaran bibit penyakit, diaktifkan upaya pencegahan dan proteksi serta tindakan dini melalui kegiatan penyemprotan/fogging, vaksinasi serta imunisasi secara teratur.

Program upaya kesehatan masyarakat diwujudkan dalam bentuk usaha kesehatan berbasis masyarakat yang terdiri dari kegiatan Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU) dan Pos Kesehatan Kelurahan (POSKESKEL). Sampai dengan Tahun 2008 jumlah POSYANDU di Kota Parepare sebanyak 112 buah dengan jumlah kader kesehatan sebanyak 560 orang. Pelayanan yang diberikan dalam kegiatan posyandu antara lain pemeriksaan Kesehatan Ibu dan anak, Pelayanan KB, pemberian imunisasi, penyuluhan gizi serta pencegahan dan penanggulangan diare. Keberadaan POSKESKEL adalah merupakan bagian dari program Kelurahan Siaga yang berarti Kelurahan yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah

dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawatdaruratan secara mandiri. POSKESKEL telah terbentuk pada 22 Kelurahan, yang masing-masing dijalankan oleh 1 orang bidan dan 2 kader kesehatan. Sampai dengan Tahun 2008, POSKESKEL yang telah memiliki sarana dan prasarana adalah sebanyak 2 Kelurahan yaitu Watang Bacukiki dan LemoE yang didanai oleh proyek DHS2.

Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, lebih difokuskan pada kegiatan mengintensifkan pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) dimana puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan. Melalui kegiatan PWS ini menjadi salah satu alternatif upaya deteksi dini atau tindakan pencegahan penyakit menular dan penyakit tidak menular sehingga bisa dilaksanakan penanganan sedini mungkin dengan penemuan dan cakupan penanganan penderita yang akan mampu terlayani secara keseluruhan.

- c. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan lingkungan sehat dan pelayanan kesehatan penduduk miskin

Kegiatan Pengadaan Neon Box sebanyak 1 (Satu) Unit yang ditempatkan pada lokasi pertigaan Jl. Jend. Sudirman dan Jl. Jend. Ahmad Yani. Program ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai jenis-jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Pelayanan Kesehatan Daerah. Lokasi penempatan neon box yang sangat strategis, memberikan kemudahan akses kepada warga dari luar daerah, khususnya dari Kabupaten Pinrang, Sidrap dan Enrekang. Untuk Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin bertujuan untuk memberikan

pelayanan kesehatan secara gratis kepada keluarga miskin yang berdomisili di Kota Parepare. Realisasi dari kegiatan tersebut adalah anggaran yang tersedia digunakan untuk menanggulangi selisih biaya antara paket sesuai dengan SK. Menkes dengan tarif pelayanan kesehatan berdasarkan Perda Kota Parepare Nomor 33 Tahun 2003.

Atas upaya pengembangan kualitas dan kapasitas pelayanan kesehatan yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Parepare dalam Tahun 2008 memperoleh **Piagam penghargaan Citra Pelayanan Prima** dari Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara kepada Rumah Sakit Umum (RSU) Andi Makkasau berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 346/Kep/M.PAN/ 10/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang diserahkan oleh Presiden RI dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 31 Oktober 2008 di Istana Negara.

3. Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp 88.708.409.000,- (belanja langsung) dengan realisasi anggaran adalah Rp 48.817.017.552,-, atau sebesar 55.03%. Penyelenggaraan urusan ini diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan antara lain;

a. Program pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan

Dilaksanakan dalam berbagai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sebagai bagian dari pengadaan sarana/fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dibandingkan

dengan panjang jalan seluruhnya pada Tahun 2007 adalah 341,29 km terjadi peningkatan panjang jalan menjadi 343,31 km Tahun 2008 dengan perincian kondisi jalan dalam kondisi baik 210,50 km Tahun 2007 meningkat menjadi 212,90 km pada Tahun 2008, kemudian kondisi jalan rusak pada Tahun 2007 adalah 94,62 km mengalami penurunan menjadi 92,73 km Tahun 2008.

b. Program pembangunan drainase/gorong-gorong

Diperuntukkan bagi kegiatan pembenahan lokasi yang sering menjadi lokasi genangan air ataupun perbaikan drainase/gorong-gorong yang sudah ada sebelumnya sehingga panjang drainase seluruhnya mengalami peningkatan dari 233,89 km Tahun 2007 menjadi 243,89 km pada Tahun 2008. Kemudian panjang drainase/gorong-gorong dalam kondisi baik juga mengalami peningkatan dari 198,81 km Tahun 2007 menjadi 219,54. Terkait dengan pembinaan dan pembenahan sanitasi pemukiman/ kawasan kumuh daerah perkotaan, sampai dengan Tahun 2008 sebenarnya secara umum di Kota Parepare sudah tidak ada kawasan kumuh, tetapi masih terdapat rumah-rumah kondisinya kumuh yang tersebar. Dari jumlah rumah seluruhnya ± 25.161 unit terdapat jumlah rumah layak huni sebanyak 18.902 unit, sedangkan kategori kurang layak huni sebanyak 6.259 unit yang tersebar pada 3 Kecamatan.

4. Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp 4.568.554.580,- (belanja langsung) dengan realisasi anggaran adalah

Rp 4.035.909.978,- atau sebesar 88.34%. Penyelenggaraan urusan ini diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan antara lain;

a. Program rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan

Diperuntukkan bagi pembangunan/pemeliharaan jalan dan jembatan yang merupakan peruntukan jalan lingkungan perumahan dan pemukiman, gorong-gorong dan saluran melalui anggaran P2P, untuk Tahun 2008 terdapat 141 paket pekerjaan yang tersebar pada seluruh Kecamatan dan Kelurahan di Kota Parepare.

b. program penerangan jalan umum

Dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan penerangan jalan umum, yaitu untuk Tahun 2008 terdapat 490 titik lampu yang telah mendapatkan pemeliharaan/penggantian titik mata lampu. Melalui program dan kegiatan ini telah dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan perekonomian masyarakat secara umum.

c. Program perencanaan tata ruang

Dilaksanakan penataan jalan kawasan pinggir laut yang difokuskan pada penataan tanggul bermain La Mario di Kelurahan Cappa Galung berupa perbaikan sarana dan prasarana tanggul, penataan sarana dan prasarana bermain serta pengecatan. Dengan pembenahan ini diharapkan fungsi kawasan tanggul La Mario sebagai lokasi taman bermain yang juga merupakan salah satu aksesoris kota dapat berfungsi secara maksimal. Pemanfaatannya bukan saja oleh masyarakat Kota Parepare tetapi juga masyarakat yang melintas dari dan ke Makassar dapat singgah untuk beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan.

5. Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dan Statistik

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp 2.501.237.500,- (belanja langsung) dengan realisasi anggaran adalah Rp 2.327.054.170,- atau sebesar 93,04%. Penyelenggaraan urusan ini diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan antara lain ;

- a. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan penyelesaian permasalahan transportasi

Dalam bentuk penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh yang menghasilkan dokumen kajian reklamasi pantai Labukkang sebagai kajian awal rencana pelaksanaan kegiatan dalam lahan hasil reklamasi pantai di Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung. Terkait dengan kegiatan koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi menghasilkan dokumen penyusunan tataran transportasi lokal (TATRALOK).

- b. Program perencanaan pembangunan daerah, ekonomi dan sosial budaya serta prasarana wilayah dan sumber daya alam

Dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan Musrembang secara berjenjang pada tingkat Kelurahan, Kecamatan, forum SKPD dan musrembang kota. Kemudian dari beberapa kajian yang dilaksanakan menghasilkan berbagai dokumen seperti dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam program perencanaan pembangunan ekonomi telah dilaksanakan penyusunan indikator ekonomi daerah dan

perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat serta monitoring dan evaluasi penanggulangan kemiskinan. Khusus perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam telah dilaksanakan penyusunan master plan pengembangan pariwisata serta kajian pengembangan perikanan air deras.

- c. Program penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah serta data PDRB

Dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan data dasar pembangunan daerah, utamanya data statistik daerah, yang dibuat dalam bentuk Buku Parepare Dalam Angka setiap tahun. Khusus untuk pengumpulan data PDRB dilakukan untuk memenuhi kebutuhan data dasar pembangunan daerah, utamanya data PDRB Kota Parepare yang dibuat dalam bentuk buku PDRB setiap tahun.

6. Penyelenggaraan Urusan Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp 1.867.052.082,- (belanja langsung) dengan realisasi anggaran adalah Rp 1.405.462.214,- atau sebesar 75.28%. Penyelenggaraan urusan ini diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan antara lain ;

- a. Program pembangunan prasarana dan fasilitas pelabuhan serta rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ
Dilaksanakan dalam bentuk pengadaan bola lampu traffic light yang diperuntukkan pada setiap titik traffic light, box lampu traffic

light sebanyak 2 set serta pengadaan suku cadang traffic light sebanyak 1 paket dan daun rambu-rambu sebanyak 50 buah.

- b. Program peningkatan pelayanan angkutan dan kualitas pelayanan publik serta program pengendalian dan pengamanan lalu lintas

Diwujudkan dalam bentuk kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi tentang tata cara mengemudi, pemahaman arti dan lambang rambu-rambu lalu lintas yang diikuti oleh 113 orang sopir/juru mudi. Untuk program pengendalian dan pengamanan lalu lintas dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, kendaraan patroli pengawalan, papan himbauan, zebra cross maupun lampu pengatur lalu lintas.

- c. Program kerjasama dengan mass media

Capaian kinerjanya lebih banyak diarahkan pada upaya mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Parepare dengan menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh dinas perhubungan Kota Parepare. Sebagai catatan bahwa bidang komunikasi dan informasi yang sebelumnya merupakan SKPD dalam bentuk kantor, namun sejak pemberlakuan PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Parepare, melebur dan bergabung dengan Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informasi. Diharapkan dengan penggabungan ini, kinerja bidang informasi dan komunikasi dapat lebih ditingkatkan dan didukung oleh aparatur yang lebih berkompeten serta lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Selama Tahun 2008, upaya pembinaan kualitas dan kapasitas dalam bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan, Komunikasi dan Informasi telah memperlihatkan kinerja yang memuaskan, dibuktikan dengan penerimaan penghargaan, yaitu **Piala Wahana Tata Nugraha** kategori Kota Sedang atas keberhasilan penciptaan tertib lalu lintas dan angkutan kota yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI pada Tanggal 21 Februari 2008 di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia.

7. Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp 6.176.967.000,- dengan realisasi anggaran adalah Rp 5.837.874.781,- atau sebesar 94.51%. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui tiga program pembangunan, yaitu :

a. Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dengan rata-rata timbulan sampah perhari pada tahun 2008 adalah 490 m³, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Tahun 2007 sebesar 486 m³. Demikian pula halnya dengan rata-rata terangkutnya sampah pada Tahun 2008 jika dibandingkan dengan Tahun 2007 mengalami penurunan dari 465 m³/hari menjadi 457 m³/hari atau dengan persentase 95,68% menurun menjadi 93,26% tingkat capaian kerjanya. Akan tetapi hal yang menggembirakan adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan persampahan dalam bentuk daur ulang, pengomposan dan incenerator, mengalami peningkatan dari Tahun 2007 sebesar 6 m³/hari menjadi 21 m³/hari pada Tahun 2008. Peningkatan partisipasi masyarakat ini mampu menekan

jumlah sampah yang tidak terangkut dari 15 m³/hari pada Tahun 2007 menjadi 12 m³/hari pada Tahun 2008. Manfaat lain yang ditimbulkan dengan peningkatan partisipasi masyarakat tersebut adalah jumlah sampah yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) juga semakin berkurang sehingga tumpukan sampah dapat ditekan sedikit demi sedikit dan mampu dimanfaatkan oleh masyarakat menjadi sumber pendapatan ekonomi tambahan.

b. Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pemantauan kualitas lingkungan, berupa pengadaan berbagai jenis peralatan dan perlengkapan laboratorium lingkungan yang berfungsi untuk menguji kualitas air atau kelas air, sehingga dapat diketahui tingkat pencemaran lingkungan permukiman, perusahaan atau industri, perdagangan dan lain-lain serta mengantisipasi terjadinya tingkat pencemaran atau kerusakan lingkungan yang lebih parah.

c. Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Diwujudkan dalam bentuk kegiatan penataan taman-taman kota dan pengadaan bibit tanaman peneduh kota. Sampai dengan Tahun 2008 luas Ruang Terbuka Hijau berdasarkan data foto citra satelit LAPAN adalah 2400,16 km². Target capaian kinerja berdasarkan revisi RTRW 2008-2028 akan diupayakan untuk mencapai target Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah sebesar 30% dari luas wilayah Kota Parepare sampai dengan 2013 sesuai dengan RPJMD 2008-2013.

8. Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan, Kependudukan dan Catatan Sipil

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp 843.493.000,- (belanja langsung) dengan realisasi anggaran adalah Rp 756.967.863,- atau sebesar 89.74%. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan, diantaranya :

- a. Program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan

Khusus masalah ketenagakerjaan melalui program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pengadaan bahan dan materi serta peralatan pendidikan dan keterampilan kerja sebanyak 4 paket untuk dilatihkan pada peserta sebanyak 64 orang yang terbagi dalam 2 paket pelatihan pendidikan dan keterampilan kerja. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi penyelesaian prosedur perselisihan hubungan industrial sebagai upaya peningkatan peran serta unsur LKS. Terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan industrial sampai dengan akhir Desember 2008 terdapat 10 kasus dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 16 orang, kesemuanya adalah merupakan kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Model penyelesaian seluruhnya dapat tertangani dengan melalui proses mediasi.

- b. Program penataan administrasi kependudukan

Salah satu kegiatannya adalah pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu yang ditandai dengan terbangunnya tower setinggi 24 meter dan siap dioperasikan untuk kepentingan on-line SIAK 2009. Kesiapan program ini juga

ditindaklanjuti dengan pelatihan tenaga operator komputer sebanyak 7 orang yang telah dibekali dengan materi pelatihan tenaga pengelola SIAK terpadu. Terkait dengan kegiatan peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dimana jumlah warga masyarakat Kota Parepare yang memiliki KTP sampai dengan akhir Tahun 2008 terdapat 80.689 orang yang telah memiliki KTP dari 86.483 orang usia penduduk wajib KTP atau dengan persentase capaian kinerja 93.30%, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan jumlah kepemilikan KTP pada Tahun 2007 sebanyak 71.421 orang dari 82.199 orang usia penduduk wajib KTP atau dengan persentase capaian kinerja 86.88%. Terhadap kepemilikan akta kelahiran juga mengalami peningkatan dari 77.851 orang pada Tahun 2007 menjadi 80.881 orang pada Tahun 2008, atau dengan persentase capaian kinerja 69.54%.

9. Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Perempuan

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp 2.243.425.000,- (belanja langsung) dengan realisasi anggaran adalah Rp 2.183.638.968,- atau sebesar 97.33%. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan antara lain :

a. Program Keluarga Berencana

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin serta pemasangan kontrasepsi KB pada Pasangan Usia

Subur (PUS) pada Tahun 2008 ini sebanyak 367 PUS khusus IUD dan implant, sedangkan pengadaan alat kontrasepsi implant sebanyak 40 set diantaranya khusus ditujukan pada Pasangan Usia Subur (PUS) keluarga miskin serta pelayanan operasi MOW dan MOP untuk 128 Pasangan Usia Subur.

- b. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak

Ditujukan pada upaya pembinaan dan fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan serta pelaksanaan program peningkatan peran serta dan kesejahteraan dalam pembangunan yang diwujudkan dalam kegiatan pembinaan organisasi perempuan dan bimbingan manajemen usaha yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelatihan dan pembekalan usaha mandiri dengan berbagai macam keterampilan serta pemberian modal usaha bersama/kelompok kerja.

10. Penyelenggaraan Urusan Sosial

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program pemberdayaan fakir miskin dan penanggulangan masalah sosial dengan sasaran utama adalah meningkatnya perhatian terhadap fakir miskin dan anak terlantar serta penanggulangan masalah sosial lainnya. Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp 416.014.500,- (belanja langsung) dengan realisasi anggaran adalah Rp 333.658.350,- atau sebesar 80.20%. Keberhasilan program ini diukur melalui pelaksanaan

kegiatan program pemberdayaan fakir miskin dan PMKS serta pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan fakir miskin dan PMKS serta pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan social, direalisasikan dalam bentuk kegiatan pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin sebanyak 65 orang. Untuk program pembinaan anak terlantar melalui kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar sebanyak 20 orang dengan harapan dari peserta yang telah dilatih akan mendapatkan pengetahuan usaha ekonomi produktif dan mampu mengembangkan dalam kehidupan sehari-harinya. Terkait dengan program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan Karang Taruna dengan jumlah yang dilatih adalah sebanyak 30 orang. Selain itu dilaksanakan juga kegiatan pelatihan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), diadakan dengan 3 angkatan yang terdiri dari Para Kepala Sekolah dan masing-masing pengelola UKS. Dari kegiatan pelatihan ini terkandung harapan adanya peningkatan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta peningkatan derajat kesehatan peserta didik.

11. Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program penunjang tumbuh dan berkembangnya usaha kecil dan menengah, termasuk pembinaan koperasi. Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini tergabung dengan anggaran urusan pilihan bidang perindustrian dan perdagangan.

Keberhasilan program ini diukur melalui pelaksanaan kegiatan, antara lain :

- a. Program penciptaan iklim UKM yang kondusif serta pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah, dengan melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan sektor usaha UMKM yang telah menunjukkan hasil yaitu untuk Tahun 2007 jumlah UMKM sebanyak 8.460 unit usaha dan pada Tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 10.096 unit usaha atau dengan persentase 83,79%. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelatihan yang diikuti oleh 90 orang peserta dengan materi pokok membangun keunggulan kompetitif UMKM melalui pemanfaatan peluang usaha dan memperkuat struktur jaringan koperasi

- b. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah

Diarahkan pada peningkatan pemupukan modal dan kemampuan memanfaatkan modal dalam rangka memantapkan struktur pemodal koperasi. Perkembangan jumlah modal koperasi hingga Tahun 2008, yang menggunakan modal sendiri adalah sebesar Rp 37,165 milyar lebih, diantaranya adalah modal luar sebanyak Rp 23,851 milyar lebih dengan jumlah anggota sebanyak 33.164 orang. Jumlah dana bergulir yang disalurkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sampai dengan Tahun 2008 adalah sebesar Rp 2, 350 milyar. Pada Tahun yang sama telah

diusulkan penambahan 13 koperasi, dimana realisasi penyaluran dana bergulir tersebut telah dapat mendongkrak pencapaian SHU koperasi walaupun jumlahnya belum cukup signifikan yaitu sebesar Rp 1,324 milyar lebih.

12. Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga serta Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan ini diarahkan pada pembinaan kegiatan kepemudaan dan olahraga serta pengembangan kebudayaan. Alokasi anggarannya adalah sebesar Rp 821.279.000,- (belanja langsung) dapat direalisasikan adalah Rp 736.892.580,- atau sebesar 89.72%. keberhasilan program ini diukur berdasarkan pelaksanaan program identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyusunan data base dan penyiapan informasi dengan tingkat keakurasian data yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi data sarana olahraga dan atlet berprestasi. Data ini akan sangat membantu dalam proses pengambilan kebijakan dalam rangka pengembangan olahraga ke depan.

13. Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp 1.132.433.250,- (belanja langsung) dengan realisasi anggaran adalah Rp 964.265.323,- atau sebesar 85.15%. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan antara lain :

- a. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal serta peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Sasaran program ini adalah meningkatnya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Pelaksanaannya dalam bentuk kegiatan pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat seperti kegiatan pendidikan dan latihan pengamanan dan pengawalan serta keprotokoleran, latihan bela diri bagi anggota satuan Polisi Pamong Praja serta peningkatan kapasitas aparatur dalam rangka siskamswakarsa di daerah bekerjasama dengan aparat keamanan. Materi tambahan yang diberikan juga adalah teknik pencegahan kejahatan yang dilibatkan dalam proses pemberian materi latihan dan penanganan demo dan huruhara. Kegiatan lain yang juga dilaksanakan adalah peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah yang diwujudkan dengan pembentukan Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) berdasarkan Keputusan Walikota Parepare Nomor 411 Tahun 2008.

- b. Program pendidikan politik masyarakat dan fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosialisasi kepada warga masyarakat yang mewakili unsur/tokoh masyarakat, dengan materi utamanya adalah antisipasi terhadap munculnya gangguan keamanan dalam situasi menjelang pemilihan kepala daerah secara langsung periode 2008-2013. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan fasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik, terlaksana dengan berdasarkan pada prosedur perhitungan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku..

14. Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Penyelenggaraan Urusan ini diimplementasikan melalui berbagai program dan kegiatan, antara lain :

- a. Program penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum dan pembinaan perangkat daerah serta persandian

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan adalah;

Sekretariat Daerah Kota, terdiri dari 10 bagian (Pemerintahan, Humas dan Protokol, Pembangunan, Ortala, Kesra, Ekonomi dan Penanaman Modal Daerah, Pengembangan SDA, Hukum dan Perundang-Undangan, Umum dan Keuangan) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 31.004.127.873,- (belanja langsung), dengan realisasi anggaran adalah Rp 19.835.608.549,- atau sebesar 63.98%. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain:

- 1) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Parepare Akhir Tahun Anggaran 2007 dan Akhir Masa Jabatan 2003-2008, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) serta Memori Serah Terima Jabatan Penjabat Walikota Parepare, sebagai bentuk realisasi kewajiban seorang Kepala Daerah dalam melakukan pertanggungjawaban administrasi fisik dan keuangan setiap tahun anggaran atau akhir masa jabatan.
- 2) Pensertifikatan pada beberapa asset pemda yang sudah difungsikan seperti lokasi bangunan sekolah, jalan umum dan

fasilitas umum lainnya, dimana sebelumnya telah diklaim oleh warga adalah kepemilikan pribadi yang dijadikan lokasi pembangunan asset pemda tersebut tetapi belum pernah mendapatkan ganti rugi. Pelaksanaan kegiatan ini diarahkan terutama untuk mewujudkan tertib hukum pertanahan melalui perbaikan sistem administrasi pertanahan dan pemberian kepastian hukum dalam upaya penataan dan pemanfaatan tanah.

- 3) Program penyebarluasan informasi pembangunan daerah, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penerbitan bulletin/majalah Bandar madani, kontrak halaman Parepare Bandar madani, operasionalisasi website Pemerintah Daerah Kota Parepare, visualisasi kegiatan Pemerintah Kota Parepare dan pengadaan sarana pengaduan masyarakat melalui SMS Centre, kegiatan tudang sipulung serta persandian sebagai sarana komunikasi dan informasi antara daerah serta antara pemerintah pusat dan propinsi.
- 4) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tindak lanjut hasil temuan pengawasan, publikasi peraturan perundang-undangan dalam bentuk publikasi melalui Sistem Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum (SJIDH).
- 5) Pekerjaan fisik pembenahan bangunan Kantor Walikota, mess pemda Jakarta, asrama HIPMI di Makassar serta melakukan seleksi calon pemimpin kegiatan melalui program sertifikasi sebagai pemenuhan persyaratan sistem pengadaan barang dan jasa sesuai dengan KEPPRES 80 Tahun 2003.

- 6) Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penetapan rencana kinerja Tahun Anggaran berikutnya serta penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pembinaan Kelompok Budaya Kerja serta pelaksanaan kegiatan Peningkatan Karya Prestatif (PKP).
 - 7) Pameran/promosi potensi pembangunan daerah, melaksanakan penyaluran beras raskin, pembinaan dan pengembangan usaha sekaligus evaluasi kinerja keuangan usaha-usaha yang ada di daerah, dan lain-lain.
- b. Program peningkatan kapasitas keuangan daerah

Peningkatan kapasitas keuangan daerah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5.603.024.500,- (belanja langsung), dapat direalisasikan anggaran yaitu Rp 5.059.176.240,-, atau sebesar 90.29%. Sasaran program ini adalah meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan daerah lainnya serta terjadinya efisiensi pengelolaan belanja dan pembiayaan keuangan daerah. Pencapaian sasaran tersebut diukur berdasarkan indikator :

- 1) Persentase peningkatan PAD dan penerimaan daerah lainnya Pendapatan Asli Daerah Kota Parepare pada Tahun 2008 mencapai Rp 31.104.316.741,05,- atau 111% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 28.022.740.320,-. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a) Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah pada tahun 2008 dapat direalisasikan Rp 4.550.374.546,- atau 126.46% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 3.598.208.920,-.

b) Retribusi Daerah

Pada tahun 2008, penerimaan retribusi daerah sebesar Rp 19.130.606.639,- atau 104.15% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 18.368.706.400,-.

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Pada tahun 2008, penerimaan bagian laba hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar Rp 1.145.664.787,45,- atau 103.65% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 917.850.000,-.

d) Lain-lain PAD yang sah

Total penerimaan lain-lain PAD yang sah pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 6.277.670.768,60,- atau 126.81% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 4.950.500.000,-.

Untuk persentase peningkatan penerimaan daerah lainnya yang meliputi: *i*) pendapatan transfer (dana perimbangan, dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta DAU dan DAK) sebesar Rp 291.879.424.628,- atau 99.77% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 292.558.232.000,-; dan *ii*) lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 25.064.098.807,- atau 132.15% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp 18.966.446.200,-

2) Efisiensi pengelolaan belanja dan pembiayaan daerah

pengelolaan belanja daerah (operasional, modal dan tidak terduga) pada tahun 2008, mengalami penurunan/efisiensi belanja dari target belanja sebesar Rp 418.510.986.139,47,-

terhadap realisasi belanja adalah Rp 333.426.665.571,33,- atau hanya sebesar 79.67%

Untuk pengelolaan pembiayaan daerah tahun 2008 yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran daerah, dari target pembiayaan Rp 91.716.767.619,47,-, dapat direalisasikan sebesar Rp 69.402.868.799,47,- atau hanya 75.67% dari target pembiayaan.

Berdasarkan pengelolaan berbagai komponen keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas keuangan daerah tersebut, sehingga pada perhitungan akhir Tahun anggaran 2008 terdapat **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)** sebesar **Rp 71.922.160.841,82,-**.

c. Program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja

Alokasi anggaran yang disiapkan dalam rangka peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah adalah sebesar Rp 913.454.200,-(belanja langsung), realisasi anggaran adalah Rp 910.722.789,- atau sebesar 99.70%. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja pemerintah. Pencapaian sasaran tersebut diukur dengan menggunakan indikator realisasi pelaksanaan program dan kegiatan antara lain :

1) Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, berupa pelaksanaan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran PP 30 Tahun 1980 dan PP 10

Tahun 1983 sebanyak 26 kasus dan menerbitkan 26 LHP; mutasi jabatan sebanyak 11 kali serta penanganan pengaduan masyarakat sebanyak 23 kasus dan menerbitkan 23 LHP. Terkait dengan pelaksanaan rapat koordinasi telah dilaksanakan sebanyak 8 kali pertemuan dalam rangka menindaklanjuti hasil temuan pengawasan. pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah serta dilaksanakan juga tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

2) Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan. Terhadap pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, diwujudkan dalam bentuk monitoring dan evaluasi program dan kegiatan setiap satuan kerja perangkat daerah serta unit kerja lainnya secara rutin dalam waktu yang tidak ditentukan.

d. Program peningkatan kinerja legislatif

Alokasi anggaran dalam rangka peningkatan kinerja legislatif adalah Rp 10.935.443.450,- (belanja langsung), realisasi anggaran adalah Rp 10.119.131.259,- atau sebesar 92.53%. Sasaran program ini adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja legislatif. Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan dengan indikator pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah.

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah, pelaksanaan hearing/penerimaan aspirasi dan dialog serta koordinasi dengan pejabat pemda dan tokoh-tokoh masyarakat maupun tokoh agama, pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan dewan dan rapat paripurna, kegiatan reses, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah serta peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD sekaligus juga melaksanakan sosialisasi peraturan daerah dan perundang-undangan kepada masyarakat.

2) Program penataan peraturan perundang-undangan

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan, publikasi peraturan perundang-undangan, kajian peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang-undangan yang baru lebih tinggi serta kesesuaian antara peraturan perundang-undangan daerah.

e. Program peningkatan kinerja aparatur kecamatan

Alokasi anggaran yang diarahkan pada peningkatan kinerja aparatur kecamatan adalah Rp 4.112.124.000,- (belanja langsung), realisasi anggaran adalah Rp 3.921.364.746,- atau sebesar 95.36%. Sasaran program ini adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, diukur dengan menggunakan indikator pelaksanaan kegiatan berupa:

1) Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat dengan melibatkan unsur-unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, aparat Babinkamtibmas dan Babinsa serta

pelibatan unsur MUSPIKA kecamatan dalam penanganan pengaduan yang sifatnya diteruskan penyelesaiannya pada tingkatan yang lebih tinggi. Kegiatan ini memberikan kontribusi positif terhadap penyelesaian kasus-kasus yang terbukti mampu diselesaikan dengan cepat dan tepat serta memberikan solusi bagi kedua belah pihak dan diupayakan tidak ada yang dirugikan.

2) Penyelenggaraan seleksi Musabaqah Tilawatil Qur'an pada tingkat kecamatan untuk dipersiapkan mewakili kecamatan dalam kegiatan yang sama pada tingkat Kota.

f. Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan

Alokasi anggaran yang diperuntukkan bagi peningkatan kualitas pelayanan perizinan adalah Rp 945.188.350,- (belanja langsung), realisasi anggaran adalah Rp 871.113.746,- atau sebesar 92.16%. Sasaran program ini adalah meningkatnya akuntabilitas dan kinerja aparatur pengelola pelayanan perizinan. Pencapaian sasaran tersebut dijelaskan dengan indikator pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik berupa pengadaan 1 set software dan hardware sistem antrian sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja pelayanan yang berbasis kompetensi serta pertimbangan tingkat pelayanan yang semakin bertambah jumlahnya.

2) Penyusunan sistem manajemen pelayanan publik dilaksanakan dalam bentuk perpanjangan sertifikat ISO 9001-2000, karena

dianggap telah memenuhi *has implemented a quality management system complying with ISO 9001:2000/SNI 19-9001:2001*, diserahkan oleh SUCOFINDO kepada Walikota Parepare dalam rangkaian acara peringatan Hari Ulang Tahun Kota Parepare ke-48 Tanggal 17 Februari 2008.

Atas upaya pengembangan kualitas dan kapasitas pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Parepare dalam Tahun 2008, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan ***Kota Parepare sebagai kota percontohan dalam pengelolaan pelayanan publik terbaik*** di Indonesia, mewakili Pemerintah Kota di Indonesia di gedung KPK Jakarta.

g. Program pendayagunaan sumber daya aparatur

Alokasi anggaran dalam rangka pendayagunaan sumber daya aparatur adalah Rp 2.169.474.400,- (belanja langsung), realisasi anggaran adalah Rp 1.839.066.213,- atau sebesar 84.77%. Sasaran program ini adalah meningkatnya kualitas SDM aparatur. Capaian program diukur dengan indikator pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain :

1) Program pendidikan kedinasan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan penjenjangan struktural bagi para pegawai yang telah dianggap memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tanggungjawab yang harus dipenuhi. Khusus untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dilaksanakan dalam bentuk diklat prajabatan CPNSD golongan I sebanyak 34 orang, golongan II sebanyak 248 orang dan golongan III sebanyak 121 orang; untuk diklat struktural

dalam bentuk diklatpim II sebanyak 2 orang; untuk program pembinaan dan pengembangan aparatur, antara lain dalam bentuk seleksi penerimaan CPNS dengan capaian kinerja dari 93 formasi honorarium daerah mampu terisi 100%, sementara dari formasi pelamar umum sebanyak 237 formasi mampu terisi 227 orang atau 95,78%.

2) Program pembinaan dan pengembangan aparatur

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seleksi penerimaan calon PNS yang meliputi seleksi penerimaan CPNS maupun pelaksanaan prajabatan CPNS juga telah berjalan sebagaimana mestinya, proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS, pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas, penyelenggaraan penerimaan praja IPDN, penyelenggaraan diklat teknis struktural, fungsional dan kepemimpinan, penyelenggaraan ujian dinas serta rapat badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan.

15. Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp 846.173.888,- (belanja langsung), dengan realisasi anggaran adalah Rp 812.954.628,- atau sebesar 96.07%. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui beberapa program yaitu :

- a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan dalam bentuk kegiatan lomba kelurahan terpadu yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat kecamatan sampai tingkat nasional.

- b. Kegiatan lainnya penyelenggaraan desiminasi dan informasi bagi masyarakat desa/kelurahan dalam bentuk penyediaan buku-buku bacaan masyarakat yang dialokasikan pada 13 taman baca Masyarakat se - Kota Parepare.

16. Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp 397.464.000,- (belanja langsung), dengan realisasi anggaran adalah Rp 311.047.119,- atau sebesar 78.26%. Beberapa program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program perbaikan administrasi kearsipan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi kearsipan

Dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan/ sosialisasi kearsipan pada lingkungan instansi pemerintah.

- b. Program bidang keperpustakaan

Dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan pustaka berupa pembelian bukuk-buku sebanyak 240 judul dan 689 eksemplar buku dari berbagai jenis. Di samping itu pula sebagai bukti perhatian dari pemerintah pusat terhadap pengembangan perpustakaan telah memberikan bantuan 1 unit mobil perpustakaan keliling yang sudah didesain sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kemudahan bagi para peminat dan peminjam buku pada mobil perpustakaan keliling tersebut.

PENYELENGGARAAN URUSAN PILIHAN

Berkaitan dengan urusan pilihan, telah dilaksanakan 7 (Tujuh) jenis urusan pilihan yaitu urusan pertanian, peternakan, kehutanan,

perikanan dan kelautan, pariwisata, perindustrian dan perdagangan, yang tergabung ke dalam tiga kelompok satuan kerja pelaksana teknis, antara lain:

17. Penyelenggaraan Urusan Pertanian (Tanaman Pangan), Peternakan, Kehutanan serta Kelautan dan Perikanan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program pembinaan dan pengembangan pertanian (tanaman pangan), peternakan, kehutanan serta kelautan dan perikanan. Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp 7.345.079.602,- (belanja langsung), dengan realisasi anggaran adalah Rp 7.144.631.307,- atau sebesar 97.27%. Sasaran yang ingin dicapai melalui program tersebut adalah meningkatnya hasil pertanian dan kesejahteraan petani, hasil peternakan, kehutanan serta kelautan dan perikanan. Untuk menilai pencapaian sasaran tersebut, digunakan indikator pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

a. Bidang pertanian (tanaman pangan)

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelatihan terhadap 40 orang petani nelayan tentang pengelolaan hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan dan kelautan, sehingga mampu memberikan nilai tambah terkait dengan usaha menambah pendapatan ekonomi keluarga.

b. Bidang peternakan

Dilaksanakan dalam bentuk pemberian vaksinasi terhadap ternak besar dan unggas lainnya. Target capaian kinerjanya adalah terjadinya penurunan jumlah penyakit menular pada ternak sebesar

5% serta pelaksanaan pemindahan karantina hewan dari areal pelabuhan Cappa Ujung ke Kelurahan Watang Soreang.

c. Bidang kehutanan

Sepanjang Tahun 2008, telah dilaksanakan penutupan terhadap lahan kritis sepanjang 5,5 ha yang mendorong peningkatan daya dukung lahan sebesar 20%. Disamping itu telah dilaksanakan juga pembinaan kelompok tani hutan rakyat sebanyak 12 kelompok yang sekaligus juga diharapkan menjadi komunitas penjaga pelestarian hutan.

d. Bidang kelautan dan perikanan

Pengembangan perikanan tangkap, sasarannya adalah peningkatan pengembangan perikanan tangkap sebesar 80% dengan kegiatan utamanya adalah pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di CempaE Kelurahan Watang Soreang. Untuk program pengembangan ekonomi masyarakat pesisir mencakup kajian optimalisasi ekonomi masyarakat pesisir dengan sasaran pengembangan kemandirian ekonomi masyarakat dengan pendekatan kelembagaan ekonomi sebesar 30%.

18. Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini tergabung dengan pelaksanaan urusan wajib olahraga dan kepemudaan. Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui dua program, antara lain :

a. Program pengembangan pemasaran pariwisata

Dalam bentuk pengembangan jaringan kerja sarana promosi pariwisata berupa sosialisasi sapa pesona pada tingkat perguruan tinggi dan Sekolah Menengah atas dan kejuruan serta mengikuti

berbagai kegiatan promosi pariwisata nusantara dalam dan luar negeri.

- b. Program pengembangan destinasi pariwisata dilaksanakan dalam bentuk penyediaan **mapping destination obyek wisata**.

19. Penyelenggaraan Urusan Perindustrian dan Perdagangan

Penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan melalui program pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan. Alokasi anggaran belanja yang ditetapkan untuk penyelenggaraan urusan ini adalah sebesar Rp 1.680.172.575,- (belanja langsung), dengan realisasi anggaran adalah Rp 1.403.715.154,- atau sebesar 83.55%. Sasaran yang ingin dicapai melalui program tersebut adalah meningkatnya hasil pengelolaan industri dan perdagangan serta memberikan dampak secara meluas kepada masyarakat. Untuk menilai pencapaian sasaran tersebut, digunakan indikator pelaksanaan kegiatan, sebagai berikut :

- a. Bidang perindustrian

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial dalam bentuk monitoring perkembangan industri, memberikan data-data sebagai berikut:

- 1) Perkembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) meningkat dengan berbagai komoditi, pada Tahun 2007 berjumlah 1.121 unit usaha, sampai dengan Tahun 2008 meningkat menjadi 1.146 unit usaha.
- 2) Tenaga Kerja sektor industri pada Tahun 2007 berjumlah 3.738 orang, untuk Tahun 2008 telah mencapai 3.871 orang atau bertambah sebanyak 133 orang.

- 3) Nilai produksi sektor industri pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 35 juta 633 ribu lebih, meningkat menjadi sebesar Rp 39 juta 150 ribu lebih Tahun 2008.

b. Bidang Perdagangan

Dalam rangka peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan dapat diketahui tentang potensi sektor perdagangan yang terus mengalami pertumbuhan, sebagai berikut:

- 1) Unit usaha, secara kumulatif mengalami peningkatan dari 3.133 unit usaha Tahun 2007 menjadi 3.328 unit usaha atau telah terjadi penambahan sebanyak 195 unit usaha
- 2) Jumlah tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja sector perdagangan pada tahun 2007 adalah sebanyak 5.206 orang, mengalami peningkatan Tahun 2008 menjadi sebanyak 5.774 orang atau bertambah sebesar 568 orang.

Untuk program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan fasilitasi modal usaha dan pengawasan mutu dagangan pedagang kaki lima dan asongan serta penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan.

D. PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN

Di samping penyelenggaraan urusan desentralisasi, pemerintah Kota Parepare juga menyelenggarakan tugas pembantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan.

Pada tahun 2008, Pemerintah Kota Parepare telah mendapatkan bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat melalui beberapa departemen yang langsung ditujukan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menangani tugas pembantuan dengan total dana sebesar Rp 2.015.953.000,- dengan realisasi anggaran adalah Rp 1.685.069.390,- atau sebesar 83.59%, dengan rincian program dan kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil

Alokasi anggaran yang diperoleh adalah Rp 865.788.000,-, dapat direalisasikan sebesar Rp 861.370.065,- atau sebesar 99.49%. Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a) Program Perluasan Pengembangan Kesempatan Kerja dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

1) Pengembangan Kewirausahaan

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terciptanya wira usaha baru. Hal ini telah terealisasi dengan membentuk kelompok usaha peternakan ikan Lele dan ikan Emas sebanyak 1 (Satu) kelompok dengan jumlah anggota 10 orang.

2) Padat Karya Produktif/Infrastruktur

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah Pemberdayaan tenaga kerja penganggur melalui kegiatan padat karya produktif. Hal ini telah direalisasikan dengan melakukan kegiatan pembukaan perintisan jalan desa sepanjang 2.500 meter dengan lebar 6 meter yang menyerap tenaga kerja penganggur setempat sebanyak 44 orang dengan volume kerja 50 hari.

3) Penyuluhan dan perluasan Informasi

Indikator keluaran yang diharapkan adalah meningkatnya efektifitas IPK dan bursa kerja online. Kegiatan ini telah direalisasikan dengan melakukan penyuluhan di lembaga pemberi kerja dengan volume 100 kali kunjungan selama 12 bulan. Dari hasil kunjungan tersebut diperoleh data bursa kerja sampai bulan Desember 2008 sebagai berikut:

- (a) Jumlah pendaftar pencari kerja sebanyak = 1689 orang
- (b) Jumlah pencari kerja yang ditempatkan = 1120 orang
- (c) Sisa pencari kerja yang belum ditempatkan = 2060 orang
(Termasuk sisa pencari kerja tahun 2007)
- (d) Jumlah permintaan lowongan kerja = 1120 orang
- (e) Lowongan kerja yang dipenuhi = 1120 orang
- (f) Sisa Lowongan kerja yang belum dipenuhi = - orang

b) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- 1) Pembinaan/Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran; Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi ke Pusat dan Propinsi, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk perjalanan Dinas dalam Negeri.
- 2) Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya dukungan administrasi kegiatan selama 12 bulan. Hal ini telah terealisasi dalam bentuk penyediaan laporan bulanan secara rutin setiap bulan, serta melakukan perjalanan dinas dalam negeri.
- 3) Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat; Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelatihan berbasis masyarakat sebanyak 1

paket. Hal ini telah direalisasikan dengan melatih sebanyak 30 orang pengusaha Kecil dan menengah untuk menerapkan K3 diperusahaan.

c) Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Pembangunan /pengadaan/ peningkatan sarana dan prasarana.

Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah tersedianya alat pengolah data sebanyak 2 (dua) unit. Hal ini telah direalisasikan dengan melakukan pengadaan barang sebanyak 3 (tiga) unit, sebagai berikut:

- 1) Notebook Sony VA 10 intelcore 2 Duo 8100
- 2) LCD Acer PD 311
- 3) Computer

d) Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian, Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan

Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

- 1) Administrasi untuk memperlancar penyelenggaraan administrasi kegiatan telah didukung 4 orang tenaga dengan volume 84 OB selama 12 bulan
- 2) Pendidikan dan Pelatihan Teknis dilaksanakan untuk membiayai 1 (satu) paket pelatihan teknis sebanyak 30 orang.
- 3) Pemetaan Status kerawanan untuk membiayai kegiatan pemetaan status kerawanan dengan hasil terdapat 150 perusahaan telah berhasil dipetakan.

2. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan

Alokasi anggaran yang diterima adalah sebesar Rp 855.165.000,-, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 533.584.325,- atau sebesar 62.39%. Tugas pembantuan yang diterima dari pemerintah pusat dalam bentuk program pengembangan agribisnis, program peningkatan ketahanan pangan, dan program pembiayaan lain-lain.

Sedangkan kegiatannya adalah pengembangan pertanian terpadu, tanaman ternak, kompos, dan biogas. Kegiatan lainnya dalam program pengembangan agribisnis adalah bantuan benih/bibit kepada petani dalam mendukung ketahanan pangan, mekanisme kegiatan produksi pertanian primer, peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu produk pertanian, pengembangan kawasan, serta perbaikan mekanisme subsidi produk. Kegiatan pada program pengembangan agribisnis lainnya adalah pengembangan pasca panen, pengolahan, dan pemasaran hasil hortikultura. Sasaran kegiatan adalah tersalurkannya bantuan benih/bibit kepada petani untuk meningkatkan produktivitasnya.

Pada program pembiayaan lain-lain adalah kegiatan gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL/GERHAN). Sampai dengan bulan Desember 2008, realisasi kegiatan sudah mencapai 100% yang meliputi pengadaan ajir sebanyak 16.500 batang, pengadaan pupuk dan obat-obatan sebanyak 3.250 kg, tanaman reboisasi pengkayaan seluas 100 Ha, tanaman hutan rakyat seluas 30 Ha, dan tanaman hutan rakyat pengkayaan seluas 50 Ha.

3. Kantor Pelatihan Kerja

Alokasi anggaran yang diperoleh adalah Rp 295.000.000,-, dapat direalisasikan sebesar Rp 290.115.000,- atau sebesar 98.34%.

Beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah:

Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan;

- a) Rapat koordinasi / kerja / dinas / pimpinan kelompok kerja/ konsultasi, realisasi pelaksanaannya adalah kegiatan pertemuan/ konsultasi bertempat di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta sebanyak 4 kali pertemuan.
- b) Penyelenggaraan pembinaan teknis administrasi, realisasi pelaksanaannya adalah kegiatan Up-Grading dalam bentuk pendidikan dan latihan pertukangan las, pertukangan listrik dan keterampilan computer.
- c) Penyelenggaraan program pelatihan berbasis kompetensi, dilaksanakan dengan 4 (Empat) paket kegiatan, diantaranya: Pelatihan keterampilan las listrik, Pelatihan keterampilan mesin bubut, pelatihan keterampilan service mobil bensin serta pelatihan keterampilan Operator computer.
- d) Penyelenggaraan program pelatihan kerja keliling (MTU), dilaksanakan dengan 5 (Lima) paket kegiatan, diantaranya: Pelatihan Keterampilan Plumbing, Pelatihan keterampilan Bordir, Pelatihan keterampilan Tata Boga, Pelatihan Keterampilan Meubel serta Pelatihan keterampilan Instalasi penerangan.

E. PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan diantaranya meliputi : kerjasama antar daerah; kerjasama daerah dengan pihak ketiga; koordinasi dengan instansi vertikal di daerah; pembinaan batas wilayah;

pengecehan dan penanggulangan bencana; penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; dan tugas-tugas umum pemerintahan lainnya yang dilaksanakan oleh daerah.

1. Kerjasama Antar Daerah

Kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama antar daerah tersebut adalah pelayanan transportasi kawasan perkotaan yang bersifat aglomerasi dalam wilayah Kapet Parepare, meliputi Kabupaten Sidrap, Kota Parepare, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang yang kemudian diberi nama **MARUPASIDAPI AJATAPPARENG**, yang bermakna berkumpul untuk bersatu saling melengkapi, sesuai dengan kesepakatan Pemerintah Daerah masing-masing.

2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga

Berkenaan dengan penyelenggaraan kerjasama antara daerah dengan pihak ketiga, maka Pemerintah Kota Parepare telah menyikapi dengan melalui beberapa bentuk kerjasama yakni: 1) kerjasama antara Pemerintah Kota Parepare (Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomasi) dengan PT. Pelindo Cabang IV Parepare tentang pengoperasian eks demaga ternak dalam bentuk perjanjian bagi hasil atas pengoperasian eks demaga temak yang terdiri dari jasa tambat dan jasa demaga; 2) kerjasama antara Pemerintah Kota Parepare (Kantor Pembangunan Masyarakat dan pemberdayaan perempuan/ Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan) dengan Yayasan Lembaga Pengkajian Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat (YLP2EM) dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintah Kota Parepare dalam perencanaan dan penganggaran,

pelibatan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang responsive gender dan penyediaan layanan publik yang memadai; 3) Perjanjian Bantuan Sosial antara Pemerintah Kota Parepare (Dinas PU dan Prasarana wilayah) dengan Kementerian Koordinator bidang kesejahteraan rakyat tentang pelaksanaan dana bantuan penanganan pasca bencana Tahun 2008; 4) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Parepare (Sekretariat Daerah Kota/ Bagian Hukum) dengan Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD) tentang pengembangan pusat informasi regulasi daerah Kota Parepare dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan good governance melalui teknologi informasi (E-government) terutama pada aspek transparansi dan partisipasi publik; dan 5) Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Parepare (Dinas Kesehatan) dengan PT. ASKES cabang Parepare dalam hal pendistribusian kartu jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) kepada masyarakat yang berhak sebagai tanda bukti kepesertaan dalam program Jamkesmas.

3. Koordinasi dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Berkaitan dengan koordinasi dengan instansi vertikal yang pada prinsipnya terdiri dari tiga, yakni Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA), Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka telah dibentuk kerjasama dan koordinasi dengan seluruh jajaran pimpinan daerah Kota Parepare. Untuk menjabarkan kegiatan koordinasi, komunikasi dan dialog tersebut dilakukan dalam Forum Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA). Selain itu juga telah

terbentuk Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah untuk membahas masalah-masalah actual dan strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

4. Pembinaan Batas Wilayah

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, perlu dilakukan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi. Penegasan batas wilayah sampai saat ini belum ada perkembangan yang memadai, harapan kita agar supaya diadakan kembali pertemuan yang dihadiri langsung oleh para pengambil kebijakan dan tokoh masyarakat setempat yang mengetahui secara pasti keberadaan batas daerah tersebut. Selain itu perlu ada penegasan sikap oleh pemerintah Propinsi maupun pusat, terkait dengan sikap tidak konsisten yang ditunjukkan oleh daerah-daerah yang bermasalah dengan batas wilayah dengan Kota Parepare.

5. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Sepanjang Tahun 2008 telah terjadi beberapa kali bencana, seperti angin kencang/putting beliung sebanyak 24 kali kejadian yang mengakibatkan beberapa rumah warga mengalami kerusakan berat maupun ringan. Untuk bencana kebakaran telah terjadi 6 kali kejadian yang menghancurkan dan kerusakan rumah warga. Di samping itu bencana longsor juga pernah terjadi sebanyak 4 kali, sehingga mengakibatkan rumah warga menjadi rusak parah tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Kesemuanya itu telah kami upayakan untuk membantu warga sebagai bentuk kepedulian atas penderitaan

mereka, walaupun dalam jumlah yang relatif kecil, karena keterbatasan dana yang dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2008.

Dalam hal kesiapan daerah untuk menanggulangi terjadinya bencana telah diupayakan untuk membuat kontingensi plan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, dilaksanakan juga pelatihan penanganan bencana dan pengungsi yang dianggarkan setiap Tahun. Disamping itu tetap diupayakan sosialisasi indeks kerawanan bencana alam tiap Kecamatan dan Kelurahan hasil survey penginderaan jarak jauh LAPAN Parepare.

6. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berkenaan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, sangat disadari bahwa ketentraman dan ketertiban umum merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Di bidang ketentraman dan ketertiban, kita patut bersyukur bahwa kondisi Kota Parepare relatif stabil, aman dan terkendali. Oleh karena itu, kita harus mempertahankan serta terus menjaga dan memelihara suasana kondusif ini dengan dilandasi nilai-nilai kearifan lokal yang kita pedomani bersama.

F. PENUTUP

Capaian kinerja tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang dijelaskan dalam Laporan ini, sesungguhnya merupakan kinerja bersama antara eksekutif dan legislatif, karena prosedur yang berlaku sesuai dengan norma yang telah disepakati dan dijalin bersama sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kota Parepare, yang secara jujur dan sangat disadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang harus segera diatasi dan dibenahi bersama.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tahun 2008, merupakan kesinambungan dari penyelenggaraan kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2008 ini dipublikasikan untuk diketahui masyarakat. Bagi masyarakat yang peduli dan ingin menyampaikan masukan, saran pendapat/tanggapan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dapat menyampaikan melalui **SMS CENTRE** Pengaduan Masyarakat **081-241350077** atau berkunjung langsung pada kantor kami melalui Bagian Hubungan Masyarakat dan atau pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Parepare Jl. Jenderal Sudirman Nomor 78, Telepon: 0421-21157 psw. 132, 133,108,117 Fax: 0421-21090. Untuk mendapatkan informasi secara mendetail dan selengkapnya mengenai Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kota Parepare Tahun 2008 dapat dibuka melalui website Pemda Kota Parepare (www.pareparekota.go.id).

Sekian dan Terima Kasih!

Parepare, Juni 2009

WALIKOTA PAREPARE,

ttd

Drs. H. MOHAMMAD ZAIN KATOE